

Transaksi Janggal Rp 300 T, Kemenkeu Bakal Rapat dengan PPATK dan Tim Pengendalian TPPU

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Keuangan atau Kemenkeu akan melakukan rapat bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Tim Pengendalian Tindak Pencucian Uang (TPPU) yang berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang dugaan rekening janggal Rp 300 triliun.Hal ini diungkap oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam rekaman suara yang diterima Tempo dari Humas Kemenkeu, Senin 13 Maret 2023. Dia mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pihaknya siap bekerja sama dengan Menko Polhukam dan siap melakukan rapat bersama."Ya rencananya Rp 300 T akan dipaparkan dalam rapat bersama dengan Tim Pemberantasan TPPU di bawah Menko Polhukam. Tapi secara aktif kami juga membangun komunikasi dengan PPATK agar bisa mendapat penjelasan lebih awal, sehingga nanti ketika ada kesesuaian akan lebih mudah dalam melakukan tindak lanjutnya," kata Prastowo, Senin.Prastowo tak menjelaskan waktu pelaksanaan rapat bersama tersebut. Dia menyebut persiapan waktu rapat masih diatur."Diharapkan secepatnya karena PPATK juga saya rasa berkepentingan untuk dapat menindaklanjuti. Kami juga ingin mendapatkan kepastian itu. Ini sedang diatur jadwal antar pimpinan supaya bisa segera," tuturnya.Selanjutnya: Mahfud MD menyampaikan temuan PPATK Rp 300 T...Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan temuan PPATK yang menduga adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu. Temuan itu di luar transaksi janggal Rp 500 miliar dari rekening eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya."Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud MD di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu 8 Maret 2023.Namun, Kemenkeu mengaku belum mendapat laporan tersebut. Hal ini dijelaskan Sri Mulyani di laman Instagram pribadinya pada Ahad, 12 Maret 2023. Dia menyebut, informasi yang disampaikan PPATK tidak sama dengan yang disampaikan pada Mahfud

MD dan APH."Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tsb ke masyarakat agar tidak simpang siur," tulis Sri Mulyani.Dia menyebut, informasi PPATK ke Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemenkeu dari 2007 hingga 2023 total berjumlah 266 laporan menyangkut 964 pegawai. Dari jumlah itu, 185 informasi adalah atas inisiatif Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK.Tempo lantas menanyakan hal ini pada Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. Namun, dia tak menjelaskan secara gamblang.Ia mengatakan PPATK dan Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemenkeu akan selalu mendiskusikan langkah-langkah yang tepat dan efektif, terkait dengan dokumen-dokumen yang telah diserahkan PPATK kepada Kemenkeu."Kalau sudah koordinasi dan solid antara PPATK dan Kemenkeu, ya data pasti sinkron. Kami solid banget kok kolaborasinya," kata Ivan melalui keterangan tertulis pada Tempo, Minggu, 12 Maret 2023.Dia melanjutkan, PPATK dan Itjen Kemenkeu selalu melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh data yang ada. Hal ini, kata dia, akan semakin memperkuat kerja sama PPATK dengan Itjen Kemenkeu sebagaimana yang telah dilakukan selama ini.Pilihan Editor:Mengenal Apa itu Pencucian Uang yang Dituduhkan Mahfud MD ke 467 Pegawai Kemenkeukuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik disini